

Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

Geby Fanesa Adelia ¹, Zul Azhar ²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: gebyfanesaadelia20@gmail.com, zulazhar@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

28 Juli Mei 2023

Disetujui:

05 Agustus 2023

Terbit daring:

01 September 2023

DOI: -

Sitasi:

Adelia, G.F & Azhar, Z (2023).
Dampak Pengembangan
Pariwisata Terhadap
Kemiskinan di Provinsi
Sumatera Barat.

Abstract

This study aims to analyze the impact of tourism development on poverty in West Sumatra Province. This type of research is descriptive and associative, using secondary data. This research method uses path analysis. The variables used are Economic Growth (Y₁), Poverty (Y₂), Tourism (X₁), Government spending on infrastructure (X₂). The data used is panel data for 19 regencies/cities for the 2016-2021 period, which were obtained from related institutions and agencies. The results of this study indicate that tourism has no influence on poverty through economic growth as a mediating variable. Government infrastructure spending has a positive and significant impact on poverty in West Sumatra Province. Taken together, there is a significant influence between tourism, government spending on infrastructure, and economic growth, on poverty in West Sumatra Province.

Keyword : Poverty, Tourism, Infrastructure, GRDP per capita.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengembangan pariwisata terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini berjenis deskriptif dan asosiatif, dengan menggunakan data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y₁), Kemiskinan (Y₂), Pariwisata (X₁), Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur (X₂). Data yang digunakan yaitu data panel 19 kabupaten/kota periode 2016-2021, yang diperoleh dari lembaga dan instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan pariwisata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Secara keseluruhan terdapat pengaruh yang signifikan antara pariwisata, pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pariwisata, Infrastruktur, PDRB per kapita.

Kode Klasifikasi JEL: P36, H54, D31

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan kronis. Kemiskinan menjadi masalah yang harus dihadapi dan mendapat perhatian khusus oleh setiap negara di dunia. Diperkirakan terdapat 698 juta jiwa atau 9% dari penduduk dunia yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2021 (Suckling, Christensen and Walton, 2021). Kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar di dunia saat ini. Bahkan pada tahun 2021, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan isu terbesar kedua di dunia setelah isu Covid-19 (Brown, 2021).

Kemiskinan terjadi diberbagai negara di dunia dan terjadi secara merata, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan mengacu pada ketidakanggupan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendekatan tersebut, pada tahun 2021 terdapat 26,50 juta jiwa atau sebesar 9,71% jiwa yang dikategorikan sebagai penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2021).

Pengentasan kemiskinan merupakan suatu hal yang penting dan harus diberikan perhatian khusus, sebab kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas hidup masyarakat, rendahnya produktivitas sumber daya manusia (SDM), dan menurunnya mutu atau kualitas generasi yang akan datang. Pengentasan kemiskinan merupakan inti dari permasalahan pembangunan dan tujuan utama dari kebijakan pembangunan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami masalah kemiskinan adalah Provinsi Sumatera Barat. Meskipun Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah di Indonesia, namun permasalahan kemiskinan ini masih menjadi salah satu isu terbesar di Sumatera Barat dan masih menjadi perhatian pemerintah. Kemiskinan merupakan penyebab sulitnya masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup, akses pendidikan, serta kesehatan (Sitanggang, 2019). Sehingga usaha-usaha pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Sumatera Barat sangat diperlukan. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2021.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat (Ribuan Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Juta Jiwa)
2016	371,55	27,76
2017	364,51	26,58
2018	357,13	25,67
2019	348,22	24,79
2020	344,23	27,55
2021	370,67	26,20

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat cenderung turun dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2021 sebesar 370,67 ribu jiwa. Angka ini menjadi angka kemiskinan tertinggi sejak tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, dimana imbasnya secara langsung mempengaruhi perekonomian masyarakat, seperti adanya pemutusan hubungan kerja, penutupan usaha pada sektor UMKM, serta pembatasan aktivitas di luar rumah.

Penurunan kemiskinan dapat terjadi karena hasil integrasi dari berbagai sektor ekonomi yang bekerja sama dalam mengurangi kemiskinan (Bur and Triani, 2019). Salah satu sektor unggulan yang berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Sumatera Barat adalah sektor pariwisata. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat; menurunkan kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, serta sumber daya; memajukan kebudayaan; meningkatkan citra bangsa; menumbuhkan rasa

cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Keberhasilan sektor pariwisata dalam menarik wisatawan untuk berkunjung dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan. Selain pariwisata, terdapat beberapa faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, diantaranya pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, dan PDRB per kapita. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Jumlah Wisatawan Nusantara, Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur, PDRB per Kapita, Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Wisatawan (Jiwa)	Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur (Rp)	PDRB per Kapita (Rp)
2016	16.170.363	707.593.169.448	28.164,93
2017	10.308.799	509.187.510.954	29.310,69
2018	10.912.929	533.892.249.616	30.470,80
2019	11.643.593	486.407.486.371	31.427,29
2020	7.914.388	303.797.654.259	30.694,42
2021	4.789.130	472.475.114.057	31.360,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi. Selama dua tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2021, jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan wisatawan yang masuk ke Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19. Segala aktivitas dibatasi atau bahkan diberhentikan, termasuk pariwisata.

Pada Tabel 2 juga bisa dilihat bahwa selama tahun 2016-2021 pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor infrastruktur mengalami naik turun (fluktuasi). Realisasi belanja pemerintah daerah untuk infrastruktur tertinggi selama periode tersebut yaitu pada tahun 2016 sebesar 707 miliar rupiah, sedangkan realisasi belanja terendah pada tahun 2020 sebesar 303 miliar rupiah. Juga dapat dilihat bahwa selama tahun 2016-2021 PDRB per kapita mengalami naik turun (fluktuasi). PDRB per kapita mengalami peningkatan selama tahun 2016-2019. Kemudian pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan, dan kembali mengalami peningkatan yang tidak signifikan pada tahun 2021. PDRB per kapita tertinggi selama periode tersebut yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp31.427,29, sedangkan PDRB per kapita terendah pada tahun 2016 sebesar Rp28.164,93.

Sumatera Barat memiliki sumber daya alam yang sangat beragam jenisnya, sehingga banyak pembangunan yang dilakukan di sektor pariwisata. Hal ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor terbesar. Perkembangan sektor pariwisata memberikan kontribusi tidak hanya bagi sektor itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar daerah pariwisata.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, dimana sebelumnya perekonomian Sumatera Barat bertumpu pada sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan. Pengembangan sektor pariwisata secara optimal dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata, maka akan mendorong sektor lain untuk berkembang. Hal ini karena bahan baku atau produk dari sektor lain diperlukan untuk menunjang pariwisata, yaitu seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan rakyat, dan sebagainya (Saragih, 2017).

Upaya untuk memajukan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat didukung oleh pembangunan infrastruktur yang ada di setiap daerahnya. Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor penting dalam proses pembangunan guna mendorong pertumbuhan dan mengentaskan kemiskinan. Adanya akses infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, listrik, air minum dan fasilitas layanan lainnya memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

Salah satu hal yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang meningkat berarti pemerintah mampu mengatasi atau menekan kemiskinan. Perekonomian bisa dikatakan meningkat apabila jumlah produk barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah mengalami peningkatan. Adapun indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah yaitu PDRB per kapita. Apabila pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita suatu daerah tinggi, artinya terdapat pekerjaan yang lebih banyak dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi,

Kemiskinan merupakan salah satu masalah makro yang menarik perhatian pemerintah dan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Kemiskinan memiliki banyak implikasi dan disebabkan oleh banyak faktor. Kemiskinan umumnya terjadi karena rendahnya pendapatan seseorang atau beberapa kelompok sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Kondisi rendahnya pendapatan ini juga akan berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Menurut (Todaro and Smith, 2006) tingkat kemiskinan di suatu negara bergantung pada dua faktor utama antara lain: (1) tingkat rata-rata pendapatan nasional, dan (2) lebar-sempitnya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa jika rata-rata pendapatan nasional suatu negara tinggi, tetapi ketimpangan distribusi pendapatan juga tinggi, maka negara tersebut tidak dapat lepas dari perangkat kemiskinan.

Suatu negara dikatakan miskin karena pada dasarnya negara tersebut memang miskin. Teori ini dikemukakan oleh Nurkse dalam (Jhingan, 2012), yang menyatakan bahwa "*a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Nurkse menjelaskan bahwa kemiskinan tidak mempunyai ujung dan pangkal, semua faktor yang dapat menjadi penyebab kemiskinan akan saling berhubungan. Teori ini dikenal dengan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*), dimana kemiskinan (ketidaksejahteraan) dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga mengurangi tabungan dan investasi. Berkurangnya investasi menyebabkan modal menjadi rendah. Modal yang rendah menyebabkan ketidaksempurnaan pasar dan terjadinya keterbelakangan. Hal tersebut terus berputar, sehingga tidak memiliki ujung dan pangkal.

Perkembangan sektor pariwisata yang mengalami peningkatan setiap tahunnya pada suatu daerah dapat memberikan pengaruh bagi daerah itu sendiri, terutama dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan. Adapun faktor penyebab kemiskinan antara lain terbatasnya lapangan pekerjaan, pendapatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, serta kualitas kesehatan yang buruk. UNWTO menyatakan bahwa pariwisata memiliki kemampuan untuk menurunkan kemiskinan yaitu dengan memperluas kesempatan bekerja, peningkatan pendapatan nasional, penerimaan devisa, dan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya data bahwa pariwisata berkontribusi terhadap PDB dunia sebesar 10% pada tahun 2017. Pariwisata dapat menciptakan 1 dari 10 pekerjaan di dunia, serta menyumbang 7% dari total ekspor dunia dan 30% ekspor jasa (Prasetya, Pudjihardjo and Badriyah, 2018).

Terdapat tiga dampak pengembangan pariwisata terhadap ekonomi, antara lain: 1) Dampak langsung, yaitu pengeluaran wisatawan dalam hal pendapatan pariwisata, lapangan kerja, dan PDB. 2) Dampak sekunder/tidak langsung, yaitu pembelian input dari industri terkait untuk memasok perusahaan pariwisata dan wisatawan, serta dampak yang ditimbulkan dari pengeluaran upah pariwisata dan keuntungan bisnis. 3) Dampak dinamis, yaitu investasi di bidang infratraktur, pembentukan sumber daya manusia, dan pengembangan kegiatan ekonomi lainnya (Medina-Muñoz, Gutiérrez-Pérez, 2015).

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta data dari Kementerian Keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu data dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Data yang diteliti meliputi LQ pariwisata, pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, PDRB per kapita, dan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan dari sifatnya, data pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu metode penelitian yang memiliki fokus pada penggunaan angka, tabel, dan diagram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*).

Berikut adalah model yang digunakan dalam penelitian:

$$Y_1 = PY_1X_1 + PY_1X_2 + ut \quad (1)$$

$$Y_2 = PY_2X_1 + PY_2X_2 + PY_2Y_1 + ut \quad (2)$$

Dimana: Y_1 adalah PDRB per kapita, Y_2 adalah jumlah penduduk miskin, X_1 adalah Indeks LQ pariwisata, X_2 adalah Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, u_t adalah *Error Term* atau tingkat kesalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji tentang pengaruh pariwisata dan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Hasil pengujian dengan analisis jalur dapat dilihat pengaruhnya secara langsung langsung dan tidak langsung. Apabila pengaruh langsung antara variabel lebih besar daripada pengaruh tidak langsung, dapat dikatakan bahwa variabel mediasi atau intervening kurang berperan, begitupun sebaliknya.

Tabel 3. Hasil Uji Estimasi Persamaan 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36.68427	4.604857	7.966429	0.0000
X1	-3.874937	2.767852	-1.399980	0.1643
Y1	-0.000517	0.000156	-3.310851	0.0013

Variabel dependen: Kemiskinan

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 3, koefisien menunjukkan pengaruh x_1 dan pengaruh y_1 terhadap y_2 . Jika dilihat pada variabel x_1 , terlihat bahwa hubungan antara x_1 terhadap y_2 adalah sebesar -3,8749 dan pada model y_1 menunjukkan besarnya hubungan antara y_1 dengan y_2 sebesar -0,0005.

Tabel 4. Hasil Uji Estimasi Persamaan 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.30434	4.131674	6.608543	0.0000
X2	9.07E-11	1.43E-11	6.323581	0.0000
Y1	-0.000633	0.000112	-5.630072	0.0000

Variabel dependen: Kemiskinan
 Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4, koefisien menunjukkan pengaruh x2 dan pengaruh y1 terhadap y2. Jika dilihat pada variabel x2, terlihat bahwa hubungan antara x2 terhadap y2 adalah sebesar 0,0000 dan pada model y1 menunjukkan besarnya hubungan antara y1 dengan y2 sebesar -0,0006.

Tabel 5. Hasil Uji Estimasi Persamaan 3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28116.25	834.8272	33.67913	0.0000
X1	9837.247	1392.057	7.066697	0.0000

Variabel dependen: PDRB per kapita
 Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 5, koefisien menunjukkan pengaruh x1 terhadap y1. Jika dilihat pada variabel x1, maka terlihat besarnya hubungan antara x1 terhadap y1 yaitu sebesar 9837,247.

Tabel 6. Hasil Uji Estimasi Persamaan 4

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31792.06	1743.741	18.23211	0.0000
X2	-1.07E-09	1.21E-08	-0.089070	0.9292

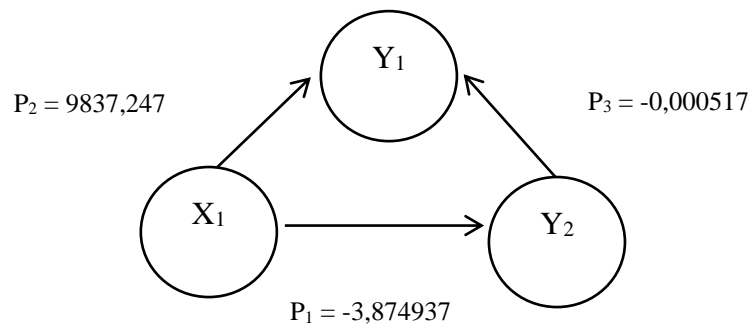
Variabel dependen: PDRB per kapita
 Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 6, koefisien menunjukkan pengaruh x2 terhadap y1. Jika dilihat pada variabel x2, maka terlihat besarnya hubungan antara x2 terhadap y1 yaitu sebesar -0,00017.

Interpretasi Hasil Path Analysis

Pengaruh Pariwisata terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening.

Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa pariwisata bisa berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tidak langsungnya yaitu dari pariwisata ke pertumbuhan ekonomi (sebagai variabel mediasi) lalu ke kemiskinan.



Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 1. Path Analysis Pengaruh Indeks LQ Pariwisata terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi.

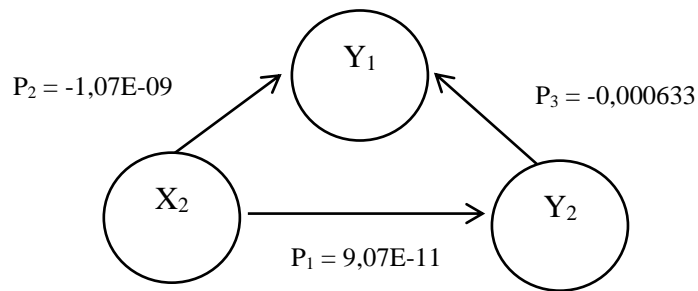
Besarnya pengaruh langsung pariwisata terhadap kemiskinan (P_1) = -3,8749. Besarnya pengaruh tidak langsung pariwisata terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yaitu ($P_2 \times P_3$) ($9837,247 \times -0,0005$) = -5,0858. Pengaruh keseluruhan yaitu pengaruh mediasi pariwisata terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = $(-3,8749 + -5,0858) = -8,9607$. Kesimpulannya yaitu nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil daripada nilai pengaruh langsung ($-8,9607 < -3,8749$) dan lebih kecil dari pengaruh tidak langsung ($-8,9607 < -5,0858$).

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung (P_1) = -3,8749 lebih tinggi daripada nilai pengaruh tidak langsung ($P_2 \times P_3$) = -5,0858 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya pariwisata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjadi variabel yang memediasi antara pariwisata terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan nilai pengaruh langsung (tanpa mediasi) lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung (dengan mediasi).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Robertico Croes (Croes, 2014) yang menyatakan bahwa pariwisata tidak memiliki efek sistemik pada masyarakat miskin, meskipun untuk masyarakat miskin dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah pengembangan pariwisata sangat penting. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Riyanto *et al.*, 2020) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa daerah dengan basis pariwisata berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, baik dari segi tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengembangan sektor pariwisata belum mampu atau bahkan tidak berhasil dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah yang signifikan. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa pengembangan pariwisata belum terdistribusi secara merata kepada masyarakat dalam hal memberikan mereka pendapatan yang lebih untuk bisa meningkatkan taraf hidup dan mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Pariwisata dapat mengurangi kemiskinan apabila pengeluaran wisatawan lebih banyak mengalir kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun, apabila pengeluaran wisatawan lebih banyak mengalir kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah dan tinggi, maka tidak akan mempengaruhi kemiskinan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening.



Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 2. Path Analysis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat hasil analisis yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur bisa berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi serta bisa berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infratsruktur ke pertumbuhan ekonomi (sebagai variabel mediasi) lalu ke kemiskinan.

Besarnya pengaruh langsung pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap kemiskinan (P_1) = 0,0090. Besarnya pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yaitu ($P_2 \times P_3$) = $(-0,0010 \times -0,0006) = 0,0006$. Besarnya pengaruh keseluruhan yaitu pengaruh mediasi pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = $(0,0090 + 0,0067) = 0,0091$.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung (P_1) = 0,0090 lebih tinggi daripada nilai pengaruh tidak langsung ($P_2 \times P_3$) = 0,00067 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Dapat juga dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjadi variabel yang memediasi antara pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan lebih besarnya nilai pengaruh langsung (tanpa mediasi) daripada nilai pengaruh tidak langsung (dengan mediasi).

Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Artinya apabila pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur meningkat, maka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur turun maka kemiskinan juga akan turun. Hal ini dapat dilihat dari estimasi pada penelitian ini yang koefisien dari variabel realisasi belanja infrastruktur yaitu sebesar 0,0000 dan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja infrastruktur mempengaruhi kemiskinan secara signifikan.

Pengaruh realisasi belanja pemerintah untuk infrastruktur yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur tersebut belum mampu memberikan dampak yang baik dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2021. Hal ini memberi asumsi bahwa alokasi biaya untuk infrastruktur yang besar tetapi tidak semua kalangan masyarakat

dapat merasakan hasilnya. Pembangunan infrastuktur yang tidak merata di suatu daerah dengan biaya yang besar tentunya tidak dapat menekan angka kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Erhan Wibowo (Wibowo, 2014), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran atau belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan aliran Keynesian, dimana aliran ini berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan ini, adanya peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian secara agregat, dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pariwisata, Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji F bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pariwisata, pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini berarti meningkat atau menurunnya kemiskinan dapat ditentukan oleh adanya pariwisata, pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya pengembangan pariwisata serta pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah, maka secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya kemiskinan dapat dituntaskan. Semua variabel dalam penelitian ini menjadi satu kesatuan dalam mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pariwisata tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Hal ini bisa diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjadi variabel yang memediasi antara pariwisata dan kemiskinan, karena lebih besar nilai pengaruh langsung (tanpa mediasi) daripada nilai pengaruh tidak langsung (dengan mediasi). Daerah dengan basis perekonomian pariwisata lebih mampu menurunkan kemiskinan dibandingkan daerah yang basis perekonomiannya bukan pariwisata, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini berarti pengembangan pariwisata tidak atau belum berhasil dalam memberikan pemerataan pendapatan kepada masyarakat, sehingga belum mampu menurunkan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjadi variabel yang memediasi antara pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur dan kemiskinan, karena lebih besar nilai pengaruh langsung (tanpa mediasi) daripada nilai pengaruh tidak langsung (dengan mediasi). Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Secara keseluruhan variabel pariwisata, pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR RUJUKAN

- BPS (2021) *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021*, BPS.go.id.
- Brown, K. (2021) *5 Global Issues To Watch In 2022*, United Nations Foundation.
- Bur, R.F.Y. and Triani, M. (2019) 'Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat', *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), pp. 451–460.
- Croes, R. (2014) 'The role of tourism in poverty reduction : An empirical assessment', 20, pp. 207–226.
- Jhingan, M.L. (2012) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. 16th edn. Edited by Rajawali. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Medina-Muñoz, D.R., Medina-Muñoz, R.D. and Gutiérrez-Pérez, F.J. (2015) 'The Impacts of Tourism on Poverty Alleviation: An Integrated Research Framework', *Journal of Sustainable Tourism*, 22(40), pp. 1–29.
- Prasetya, L.M.A., Pudjihardjo, M. and Badriyah, N. (2018) 'Analisis Pengeluaran Sektor Pariwisata terhadap Ketimpangan Upah Tenaga Kerja di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, (2013), pp. 100–118.
- Riyanto *et al.* (2020) 'The Impact of Tourism on Poverty Alleviation and Income Distribution: Evidence From Indonesia', *LPEM-FEB-UI Working Paper*, (047), pp. 1–16.
- Saragih, K.O. (2017) *Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pariwisata Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sitanggang, E. (2019) *Analisis Pengaruh Pertanian dan Pariwisata terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Samosir*. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Suckling, E., Christensen, Z. and Walton, D. (2021) *Poverty trends: global, regional and national, Development Initiatives*. (Accessed: 20 January 2022).
- Todaro, M.P. and Smith, S.C. (2006) *Pembangunan Ekonomi*. 9th edn. Edited by D. Barnadi, S. Saat, and W. Hardani. Jakarta: Erlangga.
- Wai, C. C. W. and Tan, Z. G. (2019) 'The Absolute vs Relative Poverty Conundrum', *Khazanah Research Institute*, 5(19).
- Wasudawan, K. and Ab-rahim, R. (2017) 'The Impacts Of Tourism Development On Poverty Alleviation In Sarawak', 18(2012), pp. 754–762.
- Wibowo, M.E. (2014) 'Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah)', *Skripsi*, 1–85(1), pp. 1–85.